

KMS DAN DAMPAKNYA

Dr. Rochmat Wahab, MA

Kartu Menuju Sejahtera (KMS) suatu *vocabulary* baru dalam praktek layanan pendidikan, terlebih-lebih di lingkungan Kota Yogyakarta, dimaksudkan untuk memberikan jaminan pemerataan akses pendidikan yang bermutu. Walau KMS dalam konteks ini semula muncul di Kota Yogyakarta, namun pada akhirnya menjadi wacana dan menarik orang-orang se DIY, bahkan menjangkau ke masyarakat wilayah di luar Yogyakarta, terutama yang berkepentingan untuk mengakses pendidikan di Kota Yogyakarta. Kehadiran KMS sangat mengundang semua warga masyarakat, karena itu muncullah suatu pertanyaan besar, bagaimana dampak KMS bagi perbaikan mutu pendidikan.

Kiranya patut diapresiasi tentang ide dasar yang melandasi kebijakan pemerintah yang memberikan jaminan pendidikan bermutu bagi peserta didik dari keluarga tak beruntung secara ekonomik dengan pemberian kuota tertentu, berupa kesempatan yang sangat longgar untuk mengakses pendidikan pada sekolah negeri di wilayah kota Yogyakarta. Kebijakan pemerintah tersebut menggambarkan keberpihakan pemerintah terhadap kaum lemah atau *economically disadvantaged group*. Apakah keberpihakan ini suatu solusi terbaik? Untuk menguji efektivitas kebijakan tersebut, marilah kita cermati fenomena yang ada dan dampaknya.

Pemanfaatan KMS pada prakteknya direspon secara heterogen. Fenomena yang ada bahwa ada kuota peserta didik baru di sekolah negeri tertentu yang hampir semua dipenuhi, sebaliknya ada juga sekolah negeri yang hanya dimasuki seorang dan tiga peserta didik yang ber-KMS, terutama terjadi pada sekolah negeri yang favorit. Calon peserta didik yang ber-KMS ada yang dari keluarga KMS baik dari wilayah kota, maupun ada juga yang berasal dari luar wilayah kota. Mereka juga ada yang memang benar-benar dari keluarga yang ber-KMS, namun ada juga yang berasal dari keluarga mampu yang menggunakan KMS dari keluarganya yang tinggal di kota. Atas dasar itu dapat diinfrensikan, bahwa terjadi korelasi negatif, semakin favorit sekolahnya, semakin sedikit jumlah calon peserta didik yang ber-KMS. Dengan begitu ide penggunaan KMS nampaknya belum menjadi solusi yang tepat untuk menjamin kesempatan pendidikan bermutu bagi *unreacheble kids*, yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.

Dampak positif dari kebijakan KMS secara selintas, diantaranya: adanya pemberian kesempatan yang terbuka bagi anak ber KMS untuk mengakses sekolah negeri yang tidak pernah terjadi sebelumnya, bahkan sekolah negeri yang favoritpun; adanya kesempatan yang luas bagi anak potensial untuk mengembangkan diri secara optimal; terciptanya sekolah inklusif yang dapat mengkomodir semua peserta didik; pemberian kesempatan bagi peserta didik yang mampu baik secara akademik maupun non akademik, terutama aspek ekonomik; dan sebagainya.

Sebaliknya, setelah adanya kebijakan penggunaan KMS ternyata menimbulkan dampak negatif di antaranya: terjadi manipulasi informasi tentang perpindahan penduduk, sekolah dipaksa menerima calon peserta didik “yang tak qualified” untuk belajar di sekolah negeri unggulan, ada beberapa peserta didik KMS yang mengindikasikan memiliki kesulitan beradaptasi dengan teman-temannya.

Untuk memberikan jaminan kelancaran dan kesuksesan implementasi kebijakan penggunaan KMS, maka ditawarkan sejumlah alternatif solusi terhadap peserta didik ber-KMS, di antaranya: (1) pemerintah memberikan layanan belajar tambahan di manapun yang disukai (tidak harus di Taman Pintar sebagaimana ditawarkan oleh dinas pendidikan kota), (2) sekolah menyiapkan buku teks yang diperlukan untuk dibawa pulang, (3) sekolah menyediakan fasilitas ICT yang siap diakses kapanpun, pemerintah daerah memberikan beasiswa untuk biaya personal, (4) konselor bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan secara menyeluruh, baik layanan bimbingan akademik, bimbingan personal-sosial, maupun bimbingan karir dengan lebih menekankan pada tindakan preventif dan developmental, (5) guru bertanggung jawab dalam memberikan *remedial teaching* dan *enrichment teaching*, (6) Organisasi Intra Sekolah (OSIS) memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, minat dan bakatnya, (7) dan orangtua seharusnya memberikan kelonggaran kepada anak untuk kegiatan sekolah, kendatipun boleh juga dilibatkan untuk kegiatan keluarga dan masyarakat sepanjang tidak mengganggu kegiatan sekolah.

Sebagai catatan akhir, bahwa kebijakan implementasi KMS seharusnya dipandang secara komprehensif. Artinya bahwa peserta didik ber-KMS harus dilayani tidak hanya sebatas proses penerimaan peserta didik saja, melainkan juga selama proses pendidikan perlu terus dikawal dengan tidak menjadikan layanan pendidikannya bersifat eksklusif, melainkan bersifat inklusif. Semua unsur sekolah, termasuk komite sekolah, perlu memiliki *common vision* terhadap kebijakan ini, sehingga tercipta iklim yang kondusif. Demikian juga dinas pendidikan perlu terus melakukan monitoring, jika perlu memberikan intervensi konstruktif, dengan tetap menghargai otonomi manajemen pada tingkat sekolah. Semoga.

*Penulis adalah Rektor Universitas Negeri Yogyakarta